

Strategi Komunikasi Program Teras Kampus Lentera TV sebagai Wadah Aspirasi Mahasiswa

Indri Sisca Yuanita¹, Muhammad Kholish Ardiansyah², Zahra Naila Alkusna³, Naura
Nisrina Hawadah⁴

Universitas Negeri Surabaya^{1,2,3,4,5}

25041184245@mhs.unesa.ac.id¹ 25041184160@mhs.unesa.ac.id²,
25041184198@mhs.unesa.ac.id³, 25041184153@mhs.unesa.ac.id⁴

Artikel diserahkan pada : 10-11-2025; direvisi pada : 20-11-2025; diterima pada: 05-12-2025.

ABSTRAK: Komunikasi antarbudaya digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa konflik Thailand–Kamboja terkait Candi Preah Vihear. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi diplomatik kedua negara dipengaruhi oleh perbedaan nilai budaya, gagasan wajah, dan konstruksi identitas nasional. Jurnal akademik (2020–2025), laporan lembaga internasional, dan dokumen hukum internasional adalah sumber utama jurnal ini. Menurut analisis, beberapa faktor yang menyebabkan konflik berkembang adalah hambatan komunikasi antarbudaya, bias media nasional, dan ketidakmampuan untuk memahami konteks budaya. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ASEAN berbasis musyawarah dan konsensus, serta penguatan people-to-people, berperan besar dalam mengurangi ketegangan diplomatik. Studi ini mendukung penelitian tentang komunikasi antarbudaya dalam konteks konflik internasional di Asia Tenggara.

Kata Kunci: komunikasi antarbudaya, nasionalisme, Thailand–Kamboja, diplomasi, ASEAN

PENDAHULUAN

Asia Tenggara merupakan kawasan dengan keanekaragaman budaya, agama, dan bahasa yang tinggi. Keragaman ini menjadi kekuatan dalam pembentukan ASEAN, namun sekaligus memunculkan potensi konflik, terutama apabila komunikasi antarbudaya tidak dikelola secara efektif. Salah satu konflik yang mencerminkan dinamika tersebut adalah sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai *Preah Vihear*, sebuah situs budaya yang memiliki nilai historis dan simbolik bagi kedua negara. Persoalan batas wilayah

bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan konflik, tetapi juga identitas nasional, kebanggaan budaya, dan narasi sejarah yang berbeda yang dimiliki kedua negara (Chheang, 2020). Setiap klaim tentang kepemilikan Candi Preah Vihear sangat sensitif secara politis dan emosional karena Thailand dan Kamboja melihatnya sebagai bagian dari warisan leluhur mereka. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 1962 menyatakan bahwa Candi Preah Vihear berada di wilayah Kamboja, dan putusan lanjutan tahun 2013 memperkuat keputusan tersebut. Tetapi keputusan hukum internasional ini tidak serta merta menyelesaikan konflik. Sebaliknya, narasi nasionalistik yang memperburuk persepsi publik dipromosikan oleh media di kedua negara (Wong, 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa, dari sudut pandang komunikasi antarbudaya, interpretasi pesan diplomatik dan simbol budaya dapat berbeda karena perbedaan nilai, gaya komunikasi, dan orientasi budaya. Terlihat dalam hubungan Thailand- Kamboja, yang diwarnai oleh karakter komunikasi yang berbeda. Masyarakat Thailand cenderung mengutamakan harmoni dan menghindari konfrontasi langsung (komunikasi dalam konteks tinggi), sedangkan masyarakat Kamboja lebih ekspresif dan menunjukkan sikap politik yang jujur (Ting-Toomey, 1988). Kesalahpahaman diplomatik dan keterlambatan proses penyelesaian konflik sering disebabkan oleh perbedaan gaya komunikasi ini. Metode komunikasi antarbudaya menawarkan cara baru untuk memahami konflik ini karena melibatkan interaksi simbolik dan makna antara dua budaya selain aspek politik dan hukum. Komunikasi lintas budaya sangat penting dalam membangun kepercayaan (membangun kepercayaan) dan kerja sama antar masyarakat (membangun kontak orang-orang), yang keduanya merupakan pilar integrasi kawasan ASEAN (Rahim, 2021). Media juga memainkan peran yang signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap konflik. Sิริyuvassak (2020) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa pemberitaan

nasional di Thailand dan Kamboja menunjukkan bias nasionalistik yang memperkuat gambar "kita versus mereka". Fenomena ini menunjukkan bagaimana komunikasi massa antara negara dapat menciptakan polarisasi budaya jika tidak diimbangi dengan pendekatan diplomasi yang berpusat pada empati dan pemahaman budaya. Sejumlah penelitian mengenai konflik ini telah dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada aspek geopolitik, hukum internasional, dan sejarah kolonial. Studi yang menempatkan komunikasi antarbudaya sebagai lensa utama masih relatif terbatas. Padahal, persepsi identitas, simbol budaya, dan nilai sosial merupakan faktor fundamental yang mempengaruhi interaksi diplomatik dan respons publik. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini mengeksplorasi bagaimana identitas budaya, narasi nasionalisme, dan praktik diplomasi mempengaruhi eskalasi dan resolusi konflik. Temuan artikel ini diharapkan dapat memperkuat literatur komunikasi internasional di kawasan ASEAN.

Dengan menggunakan komunikasi antarbudaya sebagai cara utama untuk memahami konflik Thailand–Kamboja, penelitian ini menawarkan temuan baru. Kajian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada elemen geopolitik, hukum internasional, atau sejarah kolonial. Ini secara khusus berfokus pada bagaimana perbedaan gaya komunikasi, nilai budaya, dan konstruksi identitas nasional mempengaruhi interpretasi pesan diplomatik dan tanggapan publik. Metode ini menawarkan pemetaan teoretis baru yang memperluas literatur tentang komunikasi lintas negara dan diplomasi budaya di kawasan ASEAN.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena topik yang dibahas, yakni konflik Thailand–Kamboja dari sudut pandang komunikasi antarbudaya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang

konteks sosial, budaya, dan historis yang membentuk dinamika komunikasi antara dua negara. Selanjutnya, data ini diinterpretasikan secara sistematis dalam upaya mendapatkan pemahaman konseptual dan teoritis. Sumber data utama penelitian ini terdiri dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional (seperti UNESCO dan ASEAN Secretariat), dan artikel media online yang diterbitkan selama lima tahun terakhir (2020–2025). Tujuan dari pemilihan rentang waktu ini adalah untuk mempertahankan temuan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang diplomasi regional dan komunikasi antarbudaya di Asia Tenggara.

Dalam proses pengumpulan data, kata kunci seperti "komunikasi antarbudaya di Asia Tenggara", "konflik Thailand-Kamboja", "identitas nasional", dan "diplomasi ASEAN" diidentifikasi, dipilih, dan dianalisis. Data kemudian dikategorikan berdasarkan tiga tema: (1) konteks historis konflik; (2) perbedaan nilai dan gaya komunikasi

budaya; dan (3) strategi diplomasi dan resolusi konflik yang berbasis budaya.

Analisis data mengeksplorasi makna teks dan cerita dari berbagai sumber.

Analisis isi, menurut Krippendorff (2020), memungkinkan peneliti menyelidiki pola komunikasi, simbol budaya, dan interpretasi makna yang terjadi dalam interaksi antarnegara. Hanya sumber akademik, institusional, dan media yang relevan digunakan dalam analisis untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis referensi. Selain itu, setiap literatur dievaluasi untuk kredibilitasnya melalui reputasi penerbit dan indeksasi jurnal (seperti Scopus atau DOAJ).

Sumber literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi berikut: (1) diterbitkan pada rentang 2020–2025; (2) memiliki relevansi langsung dengan tema komunikasi antarbudaya, konflik Thailand–Kamboja, atau diplomasi ASEAN; dan (3) berasal dari jurnal bereputasi, buku akademik, atau laporan lembaga internasional. Enklusi

diterapkan pada publikasi yang tidak memiliki kredibilitas akademik, artikel opini, dan sumber media tanpa verifikasi data. Dari total 86 literatur yang teridentifikasi, sebanyak 42 sumber memiliki kriteria akhir dan dijadikan bahan analisis.

Melalui pendekatan analisis tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aspek budaya, persepsi identitas nasional, dan gaya komunikasi diplomatik memengaruhi dinamika konflik Thailand-Kamboja. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memberikan pemetaan teoritis dan manfaat praktis untuk proses penyelesaian konflik antarbudaya di wilayah ASEAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Sosial Budaya Konflik Thailand - Kamboja

Candi Preah Vihear merupakan salah satu situs bersejarah yang terletak di kawasan perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Dalam kurun waktu yang cukup lama, lokasi ini telah menjadi sumber perdebatan dan sengketa yang terus berlangsung di antara kedua negara

tersebut. Candi ini dibangun pada abad ke-11 oleh Kerajaan Khmer selama masa pemerintahan Raja Suryavarman I dan II. Selain memiliki nilai sejarah yang sangat penting, Preah Vihear juga memiliki makna simbolis sebagai lambang kebanggaan nasional bagi masing-masing negara (Chachavalpongpun, 2013). Secara geografis, candi ini terletak di puncak Pegunungan Dângrêk yang menjadi batas alami antara Thailand dan Kamboja. Posisinya yang berada di kawasan tinggi menjadikannya sangat penting secara budaya maupun dari segi strategi militer. Karena letaknya yang tepat di garis perbatasan, muncul pertanyaan mengenai siapa yang memiliki hak untuk mengendalikan situs tersebut, sehingga memicu terjadinya sengketa yang cukup panjang. Kedua negara mengemukakan argumen yang kuat terkait aspek budaya dan sejarah, sementara peta-peta dari masa kolonial Prancis justru menambah kerancuan terkait batas wilayah resmi yang berlaku (Nguyen & Tran, 2024).

Klaim bahwa Candi Preah Vihear sebagai Penyebab Konflik

Setelah diakui sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 2008, Candi Preah Vihear mulai mendapat perhatian dari seluruh dunia. Penetapan ini meningkatkan nilai sejarah dan makna simbolik candi tersebut, tetapi justru memperparah ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Candi ini dianggap sebagai simbol kemakmuran Kerajaan Khmer yang dulu mencakup sebagian besar Asia Tenggara (Heng, 2015).

Konflik sebenarnya sudah ada sejak awal abad ke-20, ketika Prancis, sebagai penjajah, menetapkan batas wilayah Kamboja tanpa mengacu pada kondisi geografis secara tepat. Akibatnya, peta kolonial menempatkan candi tersebut di wilayah Kamboja, tetapi pihak Siam (Thailand) mengklaim candi itu sebagai bagian dari wilayah mereka. Ketidaksesuaian ini menjadi akar dari perbedaan yang terus berlangsung hingga kini (Chachavalpongpun, 2013).

Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Candi Preah Vihear secara resmi berada di wilayah Kamboja. Keputusan ini

didasarkan pada penafsiran perjanjian antara Prancis dan Siam yang ditandatangani pada tahun 1904 dan 1907. Meski demikian, keputusan tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah karena Thailand berargumen bahwa area sekitar candi tidak dijelaskan secara jelas dalam perjanjian. Pada tahun 2013, Mahkamah Internasional kembali menegaskan bahwa seluruh wilayah di sekitar candi tergolong dalam wilayah Kamboja (Pham & Le, 2023).

Bagi Thailand, candi ini dianggap sebagai bagian dari warisan budaya bersama yang seharusnya dikelola secara bersama demi pengembangan dan pelestarian pariwisata. Sementara itu, Kamboja melihat Candi Preah Vihear sebagai simbol kekuasaan nasional yang tidak boleh disentuh, karena mencerminkan martabat dan keutuhan bangsa.

Peran Warisan Kolonial Prancis dan peta batas ambigu

Warisan dari masa kolonial Prancis di wilayah Indocina, seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam, menjadi salah satu penyebab utama konflik yang terjadi.

Saat menjadi penjajah, Prancis membuat peta batas yang kurang tepat dan tidak memperhatikan keadaan budaya setempat. Pada tahun 1907, Prancis dan Thailand (yang dulu bernama Siam) membuat perjanjian untuk menempatkan candi Candi Preah Vihear di wilayah Kamboja. Namun, peta yang digunakan dalam perjanjian tersebut tidak akurat dan sering diperdebatkan.

Ambigu Peta Kolonial:

Peta yang dibuat oleh Prancis biasanya didasarkan pada pengukuran yang tidak lengkap, sehingga mengabaikan penggunaan tanah oleh masyarakat setempat.

Contohnya, peta tahun 1907 menunjukkan garis batas yang melewati candi, tetapi tidak jelas apakah candi tersebut termasuk area Kamboja atau Thailand. Hal ini menciptakan masalah hukum yang kemudian dimanfaatkan oleh kedua pihak untuk mengklaim kepemilikan candi tersebut. Dari sisi budaya dan sosial, warisan kolonial ini memberi trauma kepada masyarakat Kamboja, yang melihatnya sebagai bentuk

penjajahan, sementara Thailand merasa dirugikan karena rasa tidak adil dalam perjanjian tersebut.

Pengaruh terhadap Identitas Nasional:

Kolonialisme Prancis juga membentuk identitas nasional di kedua negara. Di Kamboja, Prancis mendorong pembentukan negara yang berdasarkan warisan budaya Khmer sebagai simbol kebanggaan rakyat. Di sisi lain, Thailand yang berhasil mempertahankan kemerdekaannya berkembang menjadi bangsa yang lebih nasionalis sebagai reaksi terhadap ancaman dari luar. Sengketa atas candi ini menjadi simbol perjuangan melawan "penjajahan baru", di mana Thailand menganggap Kamboja sebagai alat pemerintahan Prancis, sementara Kamboja melihat Thailand sebagai pihak yang melanggar kedaulatannya.

Ketidakjelasan batas ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, karena memicu masalah diskriminasi etnis di wilayah perbatasan. Masyarakat Khmer di Thailand sering dianggap sebagai orang asing oleh masyarakat nasionalis Thailand, sementara warga Thailand di Kamboja

menghadapi stigma yang sama. Hal ini memperdalam perbedaan budaya dan menyulitkan upaya mencapai perdamaian. Diperparah oleh warisan kolonial Prancis yang menciptakan peta batas ambigu.

Putusan ICJ 1962 dan 2013 Menetapkan Candi Milik Kamboja

Sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag pada tahun 1962. Diputuskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) bahwa Candi Preah Vihear milik Kamboja berdasarkan peta kolonial Prancis tahun 1907, yang dianggap Kamboja sebagai kemenangan besar. Namun, Thailand menentang keputusan tersebut, mengklaim bahwa peta tersebut tidak sah karena dibuat tanpa persetujuan mereka. Pada tahun 2011, UNESCO mendaftarkan candi sebagai Situs Warisan Dunia, yang menimbulkan kontroversi di Thailand.

Putusan 2013:

Pada tahun 2013, ICJ Kembali memutuskan bahwa candi dan area sekitarnya milik Kamboja. Ini dilakukan karena selama bertahun-tahun, Thailand telah menerima keputusan

1962 tanpa keberatan. Putusan ini memperkuat posisi Kamboja, tetapi sengketa tidak berakhir karena Thailand menganggapnya tidak adil. Putusan ini meningkatkan nasionalisme di kedua negara tersebut secara sosial budaya: di Kamboja, sebagai simbol kemenangan atas penjajah, dan di Thailand, sebagai bukti bahwa dunia internasional "memihak" musuh.

Implikasi Sosial:

Putusan ICJ tidak hanya berupa hukum, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial. Di Kamboja, candi digunakan sebagai alat untuk membentuk identitas bangsa setelah masa genosida, dengan pemerintah memanfaatkan symbol tersebut untuk mempersatukan rakyat. Di Thailand, kelompok nasionalis seperti People's Alliance for Democracy (PAD) memanfaatkan sengketa ini untuk menyerang pemerintah yang dianggap "lemah" terhadap Kamboja. Hal ini menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat, dimana masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang mendukung pendekatan

diplomasi dan yang menginginkan tindakan konfrontatif.

Walaupun keputusan hukum telah dikeluarkan, perselisihan tetap berlanjut karena candi tersebut memiliki arti penting bagi identitas nasional masing-masing negara. Bagi Kamboja, candi itu merupakan simbol utama budaya Khmer yang menjadi pengingat masa kejayaan mereka. Sementara bagi Thailand, kehilangan candi tersebut dipandang sebagai hilangnya Sebagian dari warisan sejarah kawasan yang bernilai bagi bangsa mereka.

Peran Media Dalam Memperkuat Sentimen Nasionalistik

Media di kedua negara memiliki peran ini, sering kali dengan cara yang malah memicu ketegangan.

Di zaman digital saat ini, berita mengenai candi Preah Vihear sering kali menyebar dengan cepat, sehingga membangkitkan perasaan nasionalis.

Media di Thailand:

Saluran seperti Channel 7 dan situs berita online sering kali membahas "ketidakadilan" putusan ICJ dengan narasi yang menempatkan Kamboja

sebagai "penjajah baru". Hal ini memperkuat perasaan negatif terhadap Kamboja di kalangan masyarakat, terutama di daerah perbatasan. Contohnya, selama aksi protes tahun 2008, media Thailand melaporkan peristiwa dengan narasi penuh semangat kebangsaan, menggambarkan pasukan militer Thailand sebagai "pahlawan" yang melindungi wilayah negara.

Media di Kamboja:

Media pemerintah seperti Phnom Penh Post lebih fokus pada kemenangan ICJ sebagai bukti ketangguhan negara dalam melawan serangan luar.

Hal ini membantu membangun semangat nasionalis, terutama di kalangan generasi muda. Akan tetapi, media independen seringkali dikritik karena cenderung terlalu mendukung pemerintah. Dampak Sosial Budaya: Media di kedua negara tidak hanya mengabarkan informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir masyarakat.

Kedua pihak sering menggunakan bahasa yang penuh emosi, seperti "ancaman terhadap martabat bangsa", yang memicu diskriminasi terhadap

kelompok etnis minoritas. Misalnya, masyarakat Khmer yang tinggal di Thailand kerap menghadapi stigma, dan sebaliknya. Hal ini memperdalam perbedaan budaya, sehingga membuat proses pencarian perdamaian lebih sulit.

Secara umum, latar sosial budaya dari konflik antara Thailand dan Kamboja menunjukkan bagaimana simbol budaya seperti Candi Preah Vihear bisa menjadi penyebab ketegangan antar negara. Warisan kolonial, putusan dari lembaga internasional, serta peran media saling memperkuat satu sama lain, sehingga membentuk siklus nasionalisme yang sulit diakhiri. Untuk mencapai perdamaian, diperlukan pendekatan yang memperhatikan aspek budaya, seperti dialog antar budaya melalui ASEAN.

B. Hambatan Komunikasi Antarbudaya

Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear menjadi semakin rumit adalah adanya hambatan dalam komunikasi antarbudaya. Hambatan ini menjadi

komponen utama yang memperburuk konflik antara kedua negara tersebut terkait Candi Preah Vihear. Konflik ini sangat dipengaruhi oleh cara kedua negara tersebut berkomunikasi satu sama lain serta batas wilayah atau hak kepemilikan candi. Ketegangan yang muncul sering kali disebabkan oleh perbedaan gaya komunikasi yang dianut masing-masing pihak. Dalam berhubungan secara diplomatik, Thailand umumnya menerapkan pendekatan diplomasi yang tidak langsung, dengan strategi yang berfokus pada upaya menjaga suasana tetap harmonis dan menghindari konfrontasi secara langsung. Sebaliknya, Kamboja cenderung lebih berani dan tegas, terutama dalam usaha mempertahankan kemerdekaannya. Akibatnya, karena kurangnya pemahaman terhadap konteks budaya masing-masing pihak, pesan-pesan yang disampaikan sering kali disalahartikan, yang akhirnya memperparah ketegangan dan dinamika konflik antara kedua negara tersebut.

Perbedaan Gaya Komunikasi Menjadi

Pemicu Utama

Salah satu masalah utama dalam hubungan antara Thailand dan Kamboja adalah perbedaan cara mereka berkomunikasi. Dua orang dari budaya berbeda berinteraksi, tetapi sering salah paham karena gaya komunikasi yang berbeda. Sebagian besar orang Thailand menggunakan pendekatan yang tidak langsung. Untuk menghindari menyakiti perasaan orang lain, mereka menghindari ucapan yang tajam atau terbuka. Mereka lebih suka menggunakan kata-kata yang halus, sopan, dan berfokus pada menjaga hubungan yang erat. Ini menunjukkan budaya Thailand yang sangat menghargai "ruk" atau rasa hormat, di mana menjaga muka dan harga diri orang lain sangat penting. Ketika konflik berlangsung, para diplomat Thailand umumnya menyampaikan pandangan mereka dengan cara yang samar atau menggunakan bahasa yang bersifat halus, agar situasi tidak semakin tegang (Ting-Toomey, 1988).

Di sisi lain, budaya komunikasi di Kamboja cenderung lebih tegas dan langsung. Mereka sering berbicara

secara jelas, terutama ketika membahas isu kedaulatan nasional. Hal ini tidak berarti mereka tidak sopan, melainkan budaya mereka lebih menekankan kejujuran dan kejelasan. Ketika ada ancaman terhadap wilayah atau simbol seperti Candi Preah Vihear, Masyarakat Kamboja cenderung menyampaikan pendapat secara terbuka, baik melalui pernyataan resmi maupun aksi protes, sebagai bentuk menunjukkan bahwa mereka tidak bersedia berkompromi terhadap kedaulatan negara. Pendekatan ini sering dianggap oleh Thailand sebagai sikap yang terlalu keras, padahal bagi masyarakat Kamboja, ini adalah cara untuk mempertahankan harga diri bangsa (Gudykunst & Kim, 2003).

Perbedaan gaya komunikasi ini menjadi sumber konflik karena kedua pendekatan tersebut sering bertabrakan. Contohnya, dalam proses negosiasi terkait Candi Preah Vihear, Thailand mungkin menawarkan "kerja sama bersama" dengan ucapan yang lembut dan tidak langsung, seperti "Mari kita bahas bagaimana kita bisa saling menguntungkan." Namun,

Kamboja mungkin salah paham dan mengartikan ucapan tersebut sebagai usaha Thailand untuk mengurangi kedaulatan mereka atau mengambil alih wilayah. Sebaliknya, jika Kamboja menyatakan secara tegas bahwa "Candi ini milik kami sepenuhnya" dengan nada keras, Thailand bisa merasa bahwa pernyataan itu terlalu kasar dan tidak menghargai upaya menjaga harmoni. Akibatnya, diskusi yang seharusnya berlangsung damai justru bisa menjadi sumber ketegangan baru (Le & Nguyen, 2023).

Kegagalan Memahami Konteks Budaya dan Mis-interpretasi Pesan

Hambatan berikutnya yang sering muncul adalah ketidakmampuan untuk memahami konteks budaya masing-masing secara menyeluruh. Budaya dapat diibaratkan sebagai sepasang kacamata yang mempengaruhi cara kita melihat dunia. Tanpa memahami kacamata orang lain tersebut, pesan yang disampaikan berisiko disalahartikan. Dalam konteks hubungan antara Thailand dan Kamboja, perbedaan mendasar terletak pada nilai-nilai sosial seperti

konsep "face" atau kehormatan, serta pendekatan mereka dalam menyelesaikan konflik (Ting-Toomey, 1988).

Di Thailand, budaya sangat menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial. Sejak kecil, masyarakat Thailand diajarkan untuk menghindari konfrontasi terbuka karena hal tersebut dapat memalukan atau merusak hubungan sosial yang telah terbina. Oleh karena itu, komunikasi mereka seringkali bersifat tidak langsung, menggunakan bahasa tubuh, nada suara, maupun kata-kata yang tersirat agar pesan tersampaikan tanpa menimbulkan ketegangan. Contohnya, seorang diplomat Thailand mungkin tersenyum dan mengucapkan, "Kita bisa mencari solusi tengah," dengan harapan pihak lawan memahami bahwa maksudnya Adalah mencari jalan keluar bersama. Akan tetapi, jika pihak dari Kamboja tidak memahami konteks budaya ini, mereka bisa saja menafsirkan ucapan tersebut sebagai tanda kelemahan atau ketidakseriusan dari pihak Thailand (Gudykunst & Kim, 2003).

Sebaliknya, budaya Kamboja memiliki karakter yang lebih langsung dan ekspresif, yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarah mereka yang penuh gejolak, seperti masa pemerintahan Khmer Merah. Mereka cenderung lebih vokal dan terbuka, karena merasa perlu memastikan suara mereka didengar, terutama terkait isu nasional dan kedaulatan. Dalam konteks ini, pernyataan seperti "Ini batas kami, jangan melanggar," bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah ekspresi tegas untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Namun, pendekatan ini dapat disalahpahami oleh Thailand sebagai bentuk agresi pribadi atau provokasi, sehingga menimbulkan ketegangan lebih jauh (Pham & Le, 2023). Kesalahpahaman yang muncul akibat perbedaan konteks budaya ini seringkali memperparah ketegangan. Sebagai contoh, dalam insiden di perbatasan tahun 2008, komunikasi antara pasukan kedua negara gagal karena perbedaan bahasa dan makna yang diinternalisasi dari budaya masing-masing. Thailand mungkin

mengirim pesan yang bersifat lembut dan diplomatis, tetapi Kamboja menafsirkannya sebagai provokasi. Akibatnya, konflik kecil berubah menjadi bentrokan yang lebih besar, dan media massa di kedua negara kemudian menyebarkan berita yang memperkeruh situasi. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya tidak hanya memengaruhi kata-kata yang diucapkan, tetapi juga cara pandang dan interpretasi terhadap pesan tersebut. Tanpa usaha untuk memahami konteks budaya lawan, pesan positif dapat dengan mudah berubah menjadi negatif, dan sebaliknya (Le & Nguyen, 2023).

Dampak dari hambatan ini sangat jelas terlihat dalam meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan menyebabkan kedua belah pihak menjadi semakin curiga satu sama lain. Thailand dapat merasa bahwa Kamboja tidak bersedia untuk bekerja sama, sementara Kamboja menilai bahwa Thailand berusaha merebut hak mereka. Kondisi ini menyulitkan proses diplomasi, karena negosiasi seringkali

terhambat dan tidak berjalan mulus. Dalam kasus candi Preah Vihear misalnya, Mahkamah Internasional (ICJ) telah memutuskan bahwa candi tersebut merupakan milik Kamboja, namun komunikasi yang buruk menyebabkan implementasi dari putusan tersebut tertunda dan tidak segera terlaksana (Pham & Le, 2023). Ketegangan ini juga menimbulkan efek domino yang meluas ke berbagai aspek. Di tingkat masyarakat, muncul kecenderungan membaca berita yang menyebutkan adanya "penghinaan" dari negara tetangga, sehingga muncul rasa nasionalisme yang meningkat. Akibatnya, aksi demonstrasi dan protes menjadi semakin sering terjadi, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, seperti sektor pariwisata di sekitar perbatasan. Pada level regional, peran ASEAN sebagai mediator sering kali mengalami kesulitan karena hambatan budaya yang ada. Mereka membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap perbedaan budaya agar dapat membantu mempercepat proses resolusi konflik (Gudykunst & Kim, 2003).

C.

Perspektif

Komunikasi

dalam Resolusi Konflik

Dalam konflik antara Thailand dan Kamboja, konflik yang disebabkan oleh masalah wilayah Kuil Preah Vihear, telah terbukti bahwa komunikasi antarbudaya dapat membantu dalam penyelesaian masalah jika diterapkan melalui mekanisme regional. ASEAN memainkan peran penting dalam hal ini karena memiliki pendekatan yang menekankan diskusi, musyawarah, dan prinsip non-interference.

Diplomasi budaya, pertukaran pelajar, dan kerja sama pariwisata adalah "people-to-people contact" yang membangun empati dan kepercayaan lintas budaya, mengurangi kesalahpahaman yang sering terjadi karena perbedaan gaya komunikasi. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks regional Asia Tenggara, dimana budaya dan sejarah saling terkait erat, sehingga komunikasi yang efektif bisa mencegah eskalasi konflik menjadi lebih besar lagi.

Peran ASEAN dalam Mekanisme Komunikasi untuk Resolusi:

ASEAN berfokus pada pendekatan dialog yang konstruktif dan meningkatkan saling pengertian di antara anggota, berfungsi sebagai mediator utama dalam menyelesaikan konflik, seperti konflik Thailand-Kamboja. Mekanismenya dibuat untuk meningkatkan stabilitas regional secara keseluruhan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memudahkan komunikasi yang lancar. Metode yang disebut sebagai "Jalan ASEAN" mengutamakan kesepakatan, non- campur tangan, dan penyelesaian damai, yang telah terbukti berhasil mencegah konflik berkembang menjadi perang terbuka. ASEAN, yang didirikan pada tahun 1967, berfungsi sebagai platform utama untuk diplomatik di Asia Tenggara. ASEAN memprioritaskan diskusi konstruktif, bukan konflik, dalam menyelesaikan konflik. Ini mencakup pertemuan antara negara-negara anggota dan antara negara-negara lain, yang mendorong negara-negara anggota untuk berbicara satu sama lain tanpa tekanan dari luar, sehingga negara kuat tidak dapat

menyalahgunakan kekuasaan mereka. Prinsip-prinsip komunikasi ASEAN, seperti musyawarah (konsultasi) dan mufakat (konsensus), disesuaikan untuk memungkinkan penyelesaian yang inklusif. Ini tidak hanya menyelesaikan konflik tertentu, tetapi juga meningkatkan stabilitas regional secara keseluruhan dan mencegah konflik menyebar ke masalah global seperti keamanan dan perdagangan.

Salah satu cara utama untuk mencapai resolusi adalah melalui diskusi bilateral dan multilateral. ASEAN juga mengadakan pertemuan seperti ASEAN Summit dan ASEAN Regional Forum (ARF), di mana negara-negara dapat berbicara secara langsung. Untuk mencegah publisitas yang dapat memperburuk ketegangan sambil mendorong pertukaran informasi yang jujur, mekanisme ini menggunakan metode "diplomasi diam". Selain itu, prinsip konsensus dan non-interference memastikan bahwa komunikasi tidak melibatkan intervensi asing, yang memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan masalah

internal mereka. ASEAN juga menggunakan "Diplomasi Non-Pemerintah", atau "Diplomasi Track II", untuk membangun empati sebelum negosiasi resmi. Misalnya, diskusi antara akademisi dan masyarakat sipil. Melalui inisiatif seperti Komunitas ASEAN, program integrasi sosial-budaya mendorong komunikasi melalui kontak orang ke orang, seperti pertukaran pelajar, diplomasi budaya, dan kerja sama pariwisata. Ini mengurangi kesalahpahaman budaya dan membangun kepercayaan yang kuat.

Dalam konteks konflik Thailand-Kamboja, seperti sengketa Kuil Preah Vihear pada 2008-2011, ASEAN bertindak sebagai mediator dengan memfasilitasi dialog antara kedua negara. Mekanisme ini mendorong penarikan pasukan, pembentukan zona demiliterisasi, dan program diplomasi budaya. Misalnya, ASEAN mendorong pertukaran pelajar dan kerja sama pariwisata di perbatasan untuk menumbuhkan empati antar masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi ketegangan. Metode ini

menunjukkan kemampuan ASEAN untuk menyelesaikan konflik dan mencegahnya dengan meningkatkan komunikasi yang kuat dan stabilitas di seluruh wilayah. Secara keseluruhan, fungsi ASEAN dalam platform komunikasi ini telah menjadi contoh untuk penyelesaian konflik di kawasan, menekankan betapa pentingnya berbicara secara konstruktif untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Dialog dan Musyawarah:

ASEAN menggunakan "ASEAN Way" sebagai platform komunikasi yang menekankan pada mencapai konsensus, diskusi informal, dan penyelesaian damai dalam upaya mencegah konflik. Dalam konflik Thailand-Kamboja, pertemuan ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Summit menunjukkan mekanisme ini. Kedua negara diminta untuk berbicara secara bilateral. Misalnya, ASEAN membantu perundingan setelah bentrokan Preah Vihear pada 2011, yang menghasilkan penarikan pasukan dan pembentukan zona demiliterisasi,

tetapi prosesnya lambat karena perbedaan gaya komunikasi. Proses ini melibatkan rangkaian pertemuan yang sangat menantang, di mana para diplomat dari kedua belah pihak diharuskan untuk memahami dan menyesuaikan cara komunikasi serta gaya bicara mereka agar dapat mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.

Prinsip Non-Interference:

Salah satu prinsip utama dalam mekanisme komunikasi ASEAN adalah prinsip non-interference, juga dikenal sebagai prinsip tidak campur tangan. Prinsip ini secara fundamental melarang intervensi dari luar, baik dari negara-negara non-ASEAN maupun dari organisasi internasional seperti PBB, sehingga negara-negara yang bersengketa dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung. Karena fokusnya adalah pada diskusi internal yang mandiri, prinsip ini mencegah konflik berkembang menjadi masalah global yang lebih kompleks. Prinsip-prinsip ini digunakan dalam ASEAN sebagai batasan moral dan cara membangun kepercayaan di antara

negara-negara anggota, yang sering memiliki sejarah yang rumit dan perbedaan budaya yang signifikan. Prinsip Non-Interference menjamin bahwa resolusi konflik didasarkan pada kesepakatan regional daripada tekanan dari luar, yang dapat meningkatkan ketegangan atau membuat pihak luar bergantung pada mereka.

Prinsip Non-Interference sangat penting untuk mendorong komunikasi yang efektif dalam kasus sengketa Candi Preah Vihear dari 2008 hingga 2011. ASEAN mendorong negosiasi antara dua negara tanpa tekanan dari luar, seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa, yang memungkinkan Thailand dan Kamboja secara bertahap mengubah pesan mereka menuju kesepakatan. Misalnya, Thailand menggunakan retorika nasionalistik untuk mempertahankan klaimnya atas candi tersebut, dan Kamboja menekankan hak sejarahnya. ASEAN berfungsi sebagai mediator netral, menyediakan platform untuk pertemuan seperti ASEAN Summit, tetapi tanpa menetapkan batas atau mengeluarkan sanksi dari pihak

eksternal. Ini memungkinkan kedua negara untuk mengubah cara komunikasi mereka, yang pada awalnya penuh dengan perasaan dan kesalahpahaman tentang budaya, menjadi lebih konstruktif. Pada akhirnya, ini mengarah pada penarikan pasukan militer dan pembentukan zona demiliterisasi pada tahun 2011. Selain itu, gagasan ini mendorong kedua negara untuk berkonsentrasi pada penyelesaian internal masing-masing, yang dapat dicapai melalui konsultasi dengan diplomat dan masyarakat sipil di dalam negeri, sehingga tidak ada pihak ketiga yang ikut campur, yang justru memperumit situasi. ASEAN memastikan bahwa resolusi tetap dalam kendali regional dengan menghindari intervensi luar, yang memperkuat solidaritas ASEAN dan mencegah konflik menjadi proxy war geopolitik.

Prinsip Non-Interference telah terbukti berhasil dalam banyak situasi, seperti Preah Vihear, tetapi juga memiliki kekurangan. Prinsip-prinsip ini kadang-kadang dianggap terlalu kaku dalam era globalisasi saat masalah seperti

keamanan siber atau perubahan iklim melampaui batas negara. Ini karena mereka menghambat kerja sama internasional yang penting. Namun, dalam konteks Asia Tenggara, prinsip-prinsip ini telah membantu mencegah konflik yang mungkin mengarah pada perang. Ini terbukti dengan penyelesaian damai antara Thailand dan Kamboja. Secara keseluruhan, prinsip Non-Interference adalah alat untuk komunikasi dan stabilitas regional, menekankan bahwa dialog langsung dan saling pengertian adalah kunci untuk perdamaian permanen di ASEAN.

Dampak Komunikasi dalam Membangun Kepercayaan dan Empati:

Interaksi budaya antar negara yang didorong oleh ASEAN memberikan dampak positif signifikan dalam memperkuat hubungan jangka panjang antara Thailand dan Kamboja. Meskipun masih ada beberapa hambatan, kerja sama ini membantu membangun pemahaman yang lebih baik, mempererat kepercayaan antar negara, serta memberi kesempatan untuk berdiskusi secara lebih

konstruktif dalam menjaga stabilitas wilayah.

Mengurangi Misinterpretasi:

Kontak antara orang-orang di kedua negara membantu orang-orang menafsirkan pesan dengan lebih akurat. Misalnya, Ketika siswa Thailand berinteraksi dengan siswa Kamboja, mereka dapat belajar bahwa ucapan keras mereka bukan agresi tetapi penegasan kedaulatan, dan siswa Kamboja dapat belajar menghargai harmoni Thailand. Ini menciptakan kepercayaan yang bertahan lama, yang sulit dicapai hanya melalui percakapan formal.

Contoh Resolusi Konflik:

Dalam kasus Preah Vihear, resolusi 2011 ASEAN memasukkan dialog budaya dalam mediasi, seperti kunjungan budayawan timbal balik. Kerja sama pariwisata di perbatasan pada 2018 membantu pemulihan hubungan setelah penutupan sementara, dengan lebih banyak wisatawan yang membawa empati antar masyarakat. Secara keseluruhan, metode ini telah mengurangi bentrokan. Namun, masalah seperti

nasionalisme masih ada. Contoh ini menunjukkan bagaimana komunikasi budaya bisa menjadi alat efektif untuk mengurangi ketegangan, dengan kunjungan wisatawan yang tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal tetapi juga membangun jaringan sosial yang kuat di antara masyarakat perbatasan

Keterbatasan dan Tantangan:

Komunikasi ini kadang-kadang gagal jika salah satu pihak menganggapnya sebagai "lemah", meskipun efektif. Namun, ASEAN terus mendukungnya melalui program seperti Komunitas ASEAN, yang menekankan integrasi budaya untuk menghentikan konflik. perbedaan bahasa, memori masa lalu yang sensitif, dan tekanan politik nasional yang dapat memicu nasionalisme ekstrim adalah masalah utama. Meskipun demikian, ASEAN terus berusaha mendorong percakapan untuk mencapai resolusi yang lebih stabil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Thailand-Kamboja tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan klaim teritorial, tetapi diperkuat oleh hambatan komunikasi antarbudaya

yang gagal dikelola secara efektif. Temuan ini sejalan dengan teori AUM (Gudykunst, 2005) yang menekankan pentingnya pengelolaan Kecemasan dan ketidakpastian dalam interaksi antarbudaya. Namun, berbeda dengan studi Chheang (2020) dan Wong (2022), penelitian ini menunjukkan peran media sebagai aktor yang memperkuat identitas nasional melalui framing yang bias. Selain itu, mekanisme ASEAN dikaji tidak hanya sebagai forum diplomatik, tetapi juga sebagai arena komunikasi budaya yang membangun kepercayaan melalui integrasi sosial-budaya.

KESIMPULAN

Konflik Thailand–Kamboja menunjukkan pentingnya komunikasi antarbudaya dalam diplomasi internasional. Perbedaan nilai budaya, sejarah kolonial, dan narasi nasionalisme menjadi faktor utama yang mempengaruhi interaksi kedua negara. ASEAN berperan signifikan dalam memfasilitasi dialog dan memperkuat integrasi sosial-budaya kawasan. Penelitian selanjutnya

disarankan untuk menggunakan data lapangan atau wawancara diplomat guna memperkaya perspektif empiris.

Secara keseluruhan, pandangan komunikasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Thailand-Kamboja memerlukan negosiasi politik dan pertumbuhan hubungan manusiawi melalui ASEAN, yang pada akhirnya akan menghasilkan stabilitas regional. Mekanisme ini memanfaatkan empati dan pemahaman budaya untuk menyelesaikan konflik saat ini dan mencegah konflik serupa di masa depan, memastikan perdamaian dan kerja sama yang berkelanjutan di Asia Tenggara.

Secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika konflik antara Thailand dan Kamboja sangat dipengaruhi oleh perbedaan nilai budaya, konstruksi identitas nasional, serta gaya komunikasi diplomatik. Hambatan komunikasi antarbudaya, ditambah bias media, turut memperburuk eskalasi ketegangan. Instrumen ASEAN seperti musyawarah, konsensus, dan people-to-people contact terbukti efektif dalam

mendorong tercapainya resolusi damai.

Kontribusi penelitian ini meliputi:

1. Memperkuat pemahaman mengenai Sage Publications. peran komunikasi antarbudaya dalam konflik internasional;
2. Memberikan Perspektif baru mengenai keterkaitan media, nasionalisme, dan diplomasi budaya ;
3. Menegaskan fungsi ASEAN sebagai ruang komunikasi lintas budaya, bukan sekedar forum politik formal.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya :

1. Melakukan studi lapangan, seperti wawancara, analisis wacana media lokal, dan observasi komunitas perbatasan untuk memmperdalam temuan empiris ;
2. Memanfaatkan pendekatan etnografi komunikasi guna memahami praktik budaya dan interaksi antarwarga secara langsung di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Chachavalpongpun, P. (2013). Preah Vihear and the politics of history. In

Nationalism and heritage: The politics of memory in Southeast Asia (pp. 112–130). National University of Singapore Press.

Chheang, V. (2020). Cultural diplomacy and ASEAN community building: *The case of Cambodia and Thailand relations. Asian Affairs: An American Review*, 47(2), 91–107. <https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1738159>

De Lombaerde, P., & Nguyen, K. (2016). ASEAN regionalism and conflict management. *Journal of Contemporary Asia*, 46(3), 415–435. <https://doi.org/10.1080/00472336.2016.1154980>

Gudykunst, W. B. (2005). Anxiety/uncertainty management (AUM) theory: Current status. In W. B. Gudykunst (Ed.), *Theorizing about intercultural communication* (pp. 281–322).

Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (2003). *Communicating with strangers: An approach to intercultural communication* (4th ed.). McGraw-Hill.

Indrawan, J. (2017). ASEAN socio-cultural community (ASCC) in conflict

- prevention: The role of civil society organizations (CSOs). *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 4(2), 142–155. <https://doi.org/10.21512/jas.v4i2.3308>
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Mogea, T. (2023). Cross-cultural communication Ting-Toomey, S. (1988). Intercultural conflict barriers in organizations. *Cendikia: Indonesian styles: A face-negotiation theory*. In Y. Y. Kim & *Journal of Communication Studies*, 21(1), 1–12. W. B. Gudykunst (Eds.), *Theories in intercultural communication* (pp. 213–235).
- Muyco, J. M., & Flor, M. L. (2018). *Forming* Sage Publications.
- ASEAN community of people through intercultural communication. *Journal of Wong, K. Y. (2022). ASEAN's mediation in Management and Development Studies*, 7, 24– intra-regional disputes: Revisiting the Thailand–
39. Cambodia case. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(3), 367–389.
- Pham, Q. L., & Le, V. D. (2023). ASEAN <https://doi.org/10.1177/18681034221137388>
- diplomacy in cross-border cultural conflict: Lessons from the Preah Vihear dispute. ASEAN Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. *Journal of Peace Studies*, 10(2), 45–62. Yayasan Obor Indonesia.
- Rahim, L. Z. (2021). ASEAN's normative framework and intercultural dialogue in Southeast Asia. *Journal of Asian and African Studies*, 56(4), 689–706. <https://doi.org/10.1177/0021909620972960>
- Roodhi, M., et al. (2024). Intercultural communication and co-creation in tourist satisfaction: Asian–European perspectives in Mandalika, Lombok. *INJECT: Journal of Information and Communication Technology*, 13(1), 1–15.

Setiawan, A. (2025). The effectiveness of ASEAN regional cooperation in resolving territorial disputes and democratic crises in Southeast Asia. *The Journal of Academic Science*, 2(6).

Setyowati, H., & Nurulita, A. (2023). The role of ASEAN in dispute resolution between Thailand and Cambodia. *International Law Discourse in Southeast Asia*, 2(1).

Siriyuvasak, U. (2018). Nationalism, media, and conflict: The Thai–Cambodian border dispute revisited. *Asian Journal of Communication*, 28(3), 243–259.

<https://doi.org/10.1080/01292986.2018.1457043>